

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia terdiri dari aneka ragam suku, ras, golongan, agama, adat istiadat, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda. Indonesia merupakan bagian dari negara – negara lain yang terdapat di belahan dunia ini. Semuanya itu saling membutuhkan dan memerlukan kerja sama yang saling menguntungkan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam hubungan kerja sama secara nasional, regional, maupun internasional. Demokrasi sebagai aspek penting yang berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarkhi kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik negara. Artinya, akan terdapat sistem politik nasional yang didalamnya terdapat sub sistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya.

Sistem negara demokrasi yang telah berlaku di Indonesia merupakan sistem negara demokrasi yang bersifat rasional yang dapat dilihat dari adanya struktur dan tatanan masyarakat Indonesia yang saat ini semakin berkembang. Penerapan sistem demokrasi tersebut diterapkan pada sistem perwakilan melalui mekanisme pemilihan wakil rakyat baik pada pemilu DPR, DPRD, PILKADA,

merupakan upaya memberdayakan peran dan partisipasi masyarakat terkait dengan penggunaan hak-hak politik dan sosialnya, yang dilaksanakan secara konstitusional. Dengan mewujudkan demokrasi dan demokratisasi yang dilakukan masyarakat melalui mekanisme politik partisipasi yang nantinya akan diharapkan mampu untuk memberikan multiplier effect. Partisipasi politik masyarakat adalah kegiatan warga negara sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bias bersifat pribadi maupun kolektif, dengan damai maupun dengan kekerasan, mantap atau sporadis, terorganisir maupun spontan, efektif maupun tidak efektif.

Dalam negara Demokrasi, partisipasi politik masyarakat dapat dibedakan menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti secara tidak intensif (kegiatan yang tidak menyita banyak waktu seperti memberi suara pada pemilihan umum) sangat banyak jumlahnya. Jumlah orang yang memberi waktunya terlibat secara aktif dalam politik sangat kecil jumlahnya. Dalam sistem demokrasi partai politik berfungsi sebagai pemandu berbagai kepentingan kemudian memperjuangkannya melalui proses politik yakni terlebih dahulu mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilu.

Dikebanyakan Negara demokrasi, Pemilihan umum dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu, hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keadaan keterbukaan dengan kebebasan

berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat¹. Melalui pemilihan umum yang demokratis diharapkan dapat menghasilkan lembaga-lembaga demokrasi yang bersih, dan yang pro kepentingan masyarakat yang notabena adalah sebagai pemilihnya.

Pemilihan mengkondisikan terselenggaranya mekanisme pemerintahan secara tertib, teratur, berkesinambungan, dan berjalan damai yang kesemuanya itu akan mengembangkan terbinanya masyarakat yang terdapat menghormati pendapat orang lain². Dengan adanya pemilu yang diikuti oleh partai politik akan menghasilkan kabinet di pemerintahan dan juga wakil masyarakat yang akan duduk di parlemen. Oleh karena itu, sistem pemilu akan mempengaruhi kualitas kabinet dan juga kualitas para wakil rakyat yang duduk di perlemen. Dengan keluarnya maklumat wakil Presiden tersebut maka muncullah banyak partai politik di Indonesia. Sampai pada puncaknya tahun 1955, yakni dengan dilaksanakannya pemilihan umum yang pertama kalinya di Indonesia yang diikuti oleh 28 parpol (termasuk perseorangan). Pada pemilu ini, ternyata hanya ada 4 (empat) partai politik “Besar” yakni : PNI (57 kursi), kemudian Masyumi (57 kursi), disusul oleh NU (45 kursi), lalu PKI (39 kursi).

¹ Miriam Budiarjo. 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, hal. 461

² Inong S. Ahar. 1997, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, hal. 461

Fusi partai politik sebagai suatu kebijakan andalan dari orde baru dalam mencapai stabilitas politik yang hancur pada masa orde lama yang disebabkan oleh gagalnya negara dalam mengatasi konflik di tubuh partai politik menjadi fase dimana kebutuhan politik masyarakat di pangkas. Dalam fusi ini, partai-partai politik yang ada dipaksa bersatu dengan 2 (dua) partai dan 1 (satu) golongan. Pemikiran untuk melakukan Fusi sudah ada sebelum pemilu kedua tahun 1971, akan tetapi fusi ini gagal dikakukan akibat dari berbagai kepentingan politik yang ada pada masa itu. Maka pada pemilu kedua tahun 1971 diikuti oleh 9 partai politik ditambah 1 (satu) Golongan Karya. Lalu fusi partai politik menjadi 3 (tiga) Golongan yakni Golongan Nasionalis, Golongan Spiritual, dan Golongan Karya, baru terjadi pada tahun 1973. 4 (empat) parpol Islam yakni Perti, NU, Parmusi, dan PSII digabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP); sedangkan 5 (Lima) partai lain (PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Dengan demikian pada pemilu ketiga diikuti oleh 2 (dua) partai dan satu golongan. Maka pada pemilu 1977 hanya diikuti oleh PPP, PDI, dan Golkar.

Dalam pemilu 1999, ada terdapat 48 partai politik peserta pemilu dan 24 partai politik yang ikut dalam pemilihan umum tahun 2004³. Banyaknya partai politik yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilu 1999 merupakan bahan kajian yang cukup menarik. Fenomena itu merupakan hal yang sangat wajar karena 32

³ Arifin, Susanto, PDI, (T) ...

tahun di kungkung oleh rezim orde baru yang berkuasa. Pada pemilu yang dilaksanakan 7 juli 1999 menghasilkan sejumlah partai politik kecil yang memperoleh dukungan besar yakni PDIP, PKB, Partai Golkar, PPP, PAN. Ada beberapa partai yang cukup berpengaruh tetapi tidak cukup besar dalam dukungan yakni Partai Keadilan, dan Partai Bulan Bintang. Dari hasil Pemilu tahun 1999 inilah yang membawa berkah bagi PDI Perjuangan, dukungan yang begitu besarnya dari masyarakat menjadikan PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu dan berhasil menempatkan wakilnya di DPR sebanyak 153 orang. Dalam perjalanannya kemudian, Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi KH Abdurahman Wahid yang terpilih didalam Sidang Paripurna MPR sebagai Presiden Republik Indonesia Ke 4.

Terkait mengenai pemilihan, di Kabupaten Pati pada tanggal 24 Juli 2011 kemarin telah berlangsung pemilihan kepada daerah yang memicu timbulnya konflik internal partai politik. Terjadinya konflik merupakan sebuah keniscayaan dalam proses interaksi antar individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok yang masing- masing disebabkan oleh perbedaan baik dalam latar belakang interaksi, kemampuan berinteraksi, maupun tujuan berinteraksi. Terhitung sejak Disahkannya Undang – Undang Pemilihan Kepala Daerah dari tahun 2005 – 2010 tercatat 124 kasus yang diadakan pada

yang berlanjut pada kerusuhan ini terjadi di Maluku Utara, Bengkulu, Aceh Tenggara, Sulawesi, dan Tuban.

Dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011, PDIP dilanda konflik internal menunjukkan adanya konflik yang terjadi dalam internal partai. Konflik ini timbul karena adanya kisruh pada saat pencalonan yang terjadi pada PDIP dalam Pemilukada Kabupaten Pati. Sebelumnya juga pernah terjadi konflik internal yang terjadi pada PDIP dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur di Surabaya Tahun 2010.⁴ Kasusnya hampir sama dengan konflik yang terjadi saat ini dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pati, dalam pemilukada Surabaya tahun 2010 perihal konflik yang terjadi dalam internal PDI Perjuangan kota Surabaya terkait rekomendasi yang diberikan oleh DPP PDI Perjuangan. Hanya saja terdapat perbedaan yaitu apabila di Surabaya konflik ini muncul saat pemilihan gubernur 2010, di Kabupaten Pati konflik ini muncul pada saat Pemilihan Kepala Daerah 2011 pada bulan Juli kemarin.

Konflik yang muncul pada PDIP dalam Pemilukada Kabupaten Pati tersebut terjadi pada saat mengusung calon kepala daerah, ketua partai PDIP lebih mengutamakan kader – kadernya untuk dicalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga jauh hari sebelum dilangsungkan pemilukada *Sunarwi* sebagai ketua DPC dari PDIP Kabupaten Pati dan sekaligus ketua

DPRD Kabupaten Pati untuk di usung sebagai calon kepala daerah Kabupaten Pati. Disini *Imam Suroso* sebagai kader dari PDIP dari DPC Kabupaten Pati yang merupakan anggota DPR RI dari PDIP juga ikut mencalonkan diri dalam Pemilukada Kabupaten Pati. Setelah melalui lobi lobi politik akhirnya DPP PDIP menyatakan bahwa DPP PDIP merekomendasikan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Pati *H Imam Suroso/Sujoko* sebagai bakal calon pada Pemilukada Pati. Fungsiaris DPP PDIP Aria Bima mengatakan, hal itu telah diputuskan dalam rapat DPP, Kamis 5 Mei 2011.⁵

Pada hari yang sama yaitu kamis malam 5 mei 2011, setelah turunnya surat rekomendasi dari DPP PDIP, *Sunarwi* sebagai ketua DPC PDIP Kabupaten Pati bersama sekretarisnya *Iryato Budi Utomo* mendaftarkan *Drs H Imam Suroso dan Sujoko S.Pd* ke KPU Kabupaten Pati sebagai calon pasangan bupati dan wakil bupati dari PDIP Kabupaten Pati. Namun, pada tanggal 17 Mei 2011, DPC pimpinan *Sunarwi* mencabut pendaftaran pasangan calon yang telah didaftarkan sebelumnya yaitu calon pasangan *Drs H Imam Suroso dan Sujoko S.Pd*, dan menggantikannya dengan mendaftarkan dirinya sendiri yaitu calon pasangan *Sunarwi dan Tejo Pramono*. Keberaian *Sunarwi* untuk mengganti nama pasangan calon *Drs H Imam Suroso* dengan namanya sendiri karena adanya Peraturan KPU No 13 tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, khususnya pada huruf f. Berpijak dari aturan tersebut, KPU menilai *Sunarwi* dan

⁵ Aria Bima <http://www.kompas.com>

Iriyanto sebagai Ketua dan Sekretaris DPC PDIP Pati yang berhak dan sah untuk melakukan pendaftaran, perbaikan atau penggantian nama-nama calon pasangan kepala daerah Kabupaten Pati untuk perwakilan dari PDIP.

Akibat keberanian ketua DPC PDIP untuk mengganti daftar nama calon yang telah di daftarkan sebelumnya seluruh jajaran DPC Kabupaten Pati telah dikenahi sanksi yang keras, bahkan terkesan sangat keras karena **Sunarwi** sebagai ketua DPC PDIP Kabupaten Pati yang berani membangkang rekomendasi yang telah diberikan oleh DPP PDIP. Maka **Sunarwi** akan digusur dari keanggotaan partai. Akan tetapi **Sunarwi** tetap mendaftar sebagai calon peserta Pemilukada Kabupaten Pati 2011-2016. Rupanya, bola panas yang digelindingkan KPU ini terus menggelinding. Sehingga munculah keputusan DPP PDIP tanpa ragu membekukan kepengurusan DPC PDIP Pati yang diketuai **Sunarwi**. Pembekuan yang dilakukan DPP PDIP beralasan, bahwa sesuai SK DPP No 031/-TAP/DPP/III/2011 rekomendasi kepada pasangan calon memang dapat dicabut dengan berbagai kriteria. Persoalan kemudian berlanjut. Di satu sisi, **Sunarwi-Tejo Pramono** diakui sebagai calon peserta Pemilukada oleh KPU Pati. Di sisi lain, DPP PDIP melarang **Sunarwi-Tejo Pramono** menggunakan berbagai fasilitas dan atribut PDIP untuk kepentingan kampanye dan lain sebagainya.

Selain sanksi yang telah di berikan kepada **Sunarwi** dan seluruh jajaran PDC Kabupaten Pati, DPP partai PDIP juga akan menuntut atau menggugat

KPU Pati). Karena disini KPU Kabupaten Pati telah meloloskan calon pasangan **Sunarwi – Tejo Pramono**. KPU Kabupaten Pati yang telah berkonsultasi dengan KPU Jateng bersikukuh atas keputusannya. Mereka mempersilahkan DPP Partai PDIP untuk mengajukan gugatannya. KPU Kabupaten Pati berani meloloskan calon pasangan **Sunarwi – Tejo Pramono** karena mengacu pada dasar keutusan Pasal 42 Huruf f dalam peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tersebut. Subtasi pasal tersebut menyatakan bahwa pengabaian perubahan pimpinan parpol yang mengajukan pasangan calon, jika pada saat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat. Artinya berdasarkan surat pemecatan yang telah di turunkan oleh DPP Partai PDIP terhadap Sunarwi tidak mempengaruhi status calon.

Secara teknis KPU telah menempuh langkah sesuai tahapan pemilukada. Sebaliknya DPP PDIP terkesan lambat dalam menyikapi pembangkangan yang telah dilakukan kepala DPC PDIP Kabupaten Pati. Jika sanksi yang dijatuhkan terhadap Sunarwi sebelum verifikasi calon ditutup, masih ada waktu bagi DPP untuk mengukuhkan pasangan **Imam Suroso – Sujoko**. Bagaimanapun sengketa tahap pencalonan dalam pemilukada Kabupaten Pati bersumber dari konflik internal Partai PDI. Pada akhirnya KPU menggunakan mekanisme pencalonan yang masih bergantung oleh keputusan pusat, sementara peraturan KPU hanya melegalkan calon yang diajukan oleh DPC. Sampai dengan tanggal 19 Mei 2011

vaitu merupakan batas waktu penyerahan berkas telah berakhir dan pada saat itu

bakal calon pasangan *Sunarwi – Tejo Pramono* yang terdaftar sebagai calon kepala daerah dari partai PDIP. Oleh karena itu KPU menetapkan bahwa bakal pasangan calon dalam pemilukada Kabupaten Pati dari PDIP yang syah yaitu calon pasangan *Sunarwi – Tejo Pramono*.

Setelah pemenuhan persyaratan oleh masing – masing calon kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pati, maka segera dilaksanakan tahapan – tahapan pemilukada Kabupaten Pati. Dan pada tanggal 23 Juli 2011 telah berlangsung pemilukada Kabupaten Pati dengan hasil terakhir bahwa *H.Haryanto SH.MM* yang bepasangan dengan *H.Budiyono* berhasil mengungguli pasangan lainnya dengan memperoleh 169,895 dukungan atau 28,2 %. Dari hasil pemantauan pada kantor KPUD Pati tanggal 24 Juli 2011, dengan perolehan suara masing masing peserta :

Tabel 1.1

Rekapitulasi Perolehan Suara

Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah	Prosentase
1.	Hm.Slamet Warsito BE.ST.MT	99.034	16,5 %
2.	H.Sunarwi SE.MM	133.468	22.2 %
3.	Ir.H.Srimerditomo MM	98.593	16,4 %
4.	Sri Susahid SH,MH	4.320	0,7 %
5.	H.Haryanto SH.MM	169.895	28,2 %
6.	Hj.Kartina Sukawati SE.MM	96.233	16.0 %

Melihat perolehan suara dari masing masing calon tidak ada yang mencapai 30 persen, dimungkinkan akan terjadi dua putaran pemilukada, untuk perolehan suara terbanyak pertama, kedua dan ketiga. demikian dikatakan ketua KPUD Pati, seusai perhitungan suara.⁶

Selama menunggu pemilu putaran kedua *Imam Suroso – Sujoko* menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan mengadukan pekaranya ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan termohon KPU Pati dan pasangan *Sunarwi – Tejo Pramono* pada tanggal 29 Juli 2011. Menurut Arteria sebagai kuasa hukum Imam Suroso dalam harian Suara Merdeka, edisi 9 agustus 2011 mengatakan bahwa :

“Berebekal rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan itu, Mbah Roso mendaftarkan diri ke KPU Pati. Ketika mendaftarkan diri tersebut, Ketua DPC PDIP Pati Sunarwi ikut mengantar. Namun, lanjut Arteria, seiring waktu Suroso-Sujoko urung ditetapkan karena KPU menetapkan Sunarwi yang berpasangan dengan Tejo Pramono. Arteria menegaskan DPP PDIP tidak pernah mencabut rekomendasinya atas Suroso-Sujoko. KPU (Pati) mengizinkan penarikan sepihak, tidak memberikan akses bagi kami untuk melakukan pemenuhan berkas dan mengizinkan orang yang tidak berhak mencalonkan diri dari PDIP, ujar Arteria dalam sidang perkara No 82/PHPU.D-IX/2011 “

Pada 17 Mei 2011, pemohon mendapat informasi Sunarwi selaku ketua dan Irianto Budi Utomo selaku sekretaris DPC PDIP Kabupaten Pati mencabut berkas pencalonan pemohon dan menggantinya dengan berkas pencalonan atas

⁶ Pramudya Budi Listyanantoro (Pram), <http://www.ripiu.com/article/read/perolehan-suara-sementara-pilkada-pati-23-juli-2011-terkini>, 3 okt 2011

Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten oleh KPU Pati Nomor 45/BA/KPU/VII/2011.	kembali pasangan calon dalam Pilkada 2011.
3. Keputusan KPU Pati No.47 Th.2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Tiap Pasangan tertanggal 26 Juni 2011.	KPU Pati harus melaksanakan Pilkada ulang tahun 2011.
4. Keputusan KPU Pati No. 48/2011 tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Putaran Kedua tertanggal 27 Juni 2011.	KPU Pusat, Bawas Pemilu, KPU Jateng, Panwas Kabupaten Pati untuk mengawasi pilkada ulang sesuai kewenangannya.
5. Mendiskualifikasi pasangan Sunarwi-Tejo Pramono pada Pilkada 2011	

Sumber: Suara Merdeka, edisi senin, 22 agustus 2011

Berkaitan dengan konflik internal yang terjadi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan membawa dampak bagi kinerja organisasi DPC PDIP dalam menjalankan fungsi partai politiknya. Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi adalah:

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna untuk mengukur tingkat capaian kinerja, dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. **Responsivitas**, mengukur tentang pentingnya responsivitas dalam hubungannya dengan penilaian kinerja, yaitu bentuk kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik.⁸
- b. **Responsibilitas**, mengukur sejauh mana pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan kebijaksanaan organisasi yang benar;
- c. **Kualitas Pelayanan**, menilai seberapa jauh pelayanan dapat melaksanakan tugasnya⁹
- d. **Profesionalisme**, mengukur jumlah/tingkat sumberdaya pegawai yang melaksanakan tugas-tugas suatu organisasi yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi
- e. **Finansial**, mengukur jumlah dan tingkat ketersediaan dana yang merupakan salah satu sumberdaya yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik, untuk mencapai tujuan kegiatan didalam suatu proses kelembagaan;

⁸ Agus dwiyanto, "Budaya Paternalisme dalam Birokrasi Pelayanan Publik", Policy Brief, Center for Population and Policy Studies, UGM, Yogyakarta. 2002, hal. 2

⁹ Kurniawati, Sistem Informasi Manajemen (Diklat) Organisasi Publik, Gedung 14, Yogyakarta

- f. Akuntabilitas*, menurut mengukur tingkat konsistensi antara seberapa besar kebijakan dan kegiatan dengan kehendak aspirasi masyarakat.¹⁰
- g. Struktur Organisasi*, Mengukur menilai adanya hubungan antar bagian yang mempunyai tugas dan fungsi yang saling berhubungan bagi kegiatan-kegiatan ke arah tujuan, serta mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam pelayanan publik.

Adanya indikator- indikator diatas dalam pelaksanaan kinerja organisasi dapat memudahkan DPC PDIP dalam menjalankan fungsi- fungsi partai politiknya. Dalam hal ini fungsi partai politik seperti sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, pengelola konflik, agregasi dan artikulasi kepentingan dan partisipasi politik. Jadi adanya fungsi partai politik ini diharapkan dapat dijadikan tolak ukur bagi partai politik dalam menjalankan kinerjanya yang sesuai dengan fungsi partai politik.

Melihat fenomena konflik internal yang terjadi pada Dewan Perwakilan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Pati dalam Pemilu Tahun 2011, terkait dengan keberanian ketua DPC PDIP yang berani mencabut dan mengganti nama calon pasangan yang telah di rekomendasikan oleh DPP PDIP, sehingga munculah keputusan DPP PDIP tanpa ragu membekukan kepengurusan DPC PDIP Pati yang diketuai *Sunarwi*. Pembekuan yang dilakukan DPP PDIP beralasan, bahwa sesuai SK DPP No 031/-

¹⁰ Effendi, Sofien, Materi Kuliah, *Analisis Kebijakan Publik*, 2011, hal. 100

TAP/DPP/III/2011. Dengan diturunkannya surat pembekuan oleh DPP PDIP penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh konflik internal partai (pembekuan terhadap ketua DPC PDIP) terhadap kinerja partai politik dalam menjalankan fungsi partai politiknya. Apabila partai politik dapat menjalankan kinerjanya sesuai dengan fungsi partai politik, maka masyarakat tidak akan kecewa dengan partai politik yang telah dipilihnya dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana pengaruh konflik internal yang terjadi pada PDIP terhadap kinerja partai politik ? “Studi kasus di DPC PDIP Kabupaten Pati”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai untuk mendapatkan hasil dari penulisan ini.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui pengaruh konflik internal terhadap kinerja partai

2. Ingin mengetahui pelaksanaan fungsi partai politik yang dilaksanakan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Meningkatkan pemahaman dan wacana tentang pengaruh konflik terhadap kinerja organisasi partai politik di Indonesia.
2. Memberi masukan kepada partai politik khususnya tentang pelaksanaan fungsi – fungsi partai politik.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Konflik

a. Pengertian Konflik

Konflik merupakan serangkaian peristiwa yang biasanya terjadi dalam masyarakat, bahkan konflik bias terjadi dalam hubungan kerjasama antar individu, ataupun kelompok. Konflik selalu melibatkan orang, pihak atau kelompok orang yang menyangkut masalah yang menjadi inti dalam permasalahan, yang mempunyai proses perkembangan dan nada kondisi yang menjadi latar belakang. Dalam kehidupan politik masyarakat sering dihadapkan pada konflik dalam rangka untuk mendapatkan atau memperjuangkan sumber daya langka yang tidak jarang disertai dengan kekerasan.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian konflik adalah
pertentangan, perebutan, pertentangan

bertentangan), perselisihan yang sangat menyebabkan ketidakcocokan dsb¹¹. Konflik mengandung pengertian “ benturan “, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu dan individu lain , kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Konflik terjadi antar kelompok yang memperebutkan hal yang sama.¹²

Dalam menyelesaikan konflik banyak cara yang dapat digunakan, beberapa alat bantu dan teknik yang dapat dilakukan. Untuk dapat mengetahui situasi dengan baik kita bisa menggunakan cara pemetaan konflik. Pemetaan konflik adalah suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis. Menghubungkan pihak- pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Ketika masyarakat memiliki berbagai sudut pandang berbeda memetakan situasi mereka bersama. Mereka saling mempelajari pengalaman dan pandangan masing – masing.¹³

Suatu konflik dapat ditinjau dari aspek social dan politik. Konflik berdimensi sosial bisa diartikan sebagai perjuangan dan pertentangan untuk mendapatkan nilai – nilai atau pengakuan status, keistimewaan tradisi, dan sumber daya yang langka. Tujuan kelompok – kelompok yang berkonflik tidak hanya mendapatkan nilai – nilai yang diinginkan tapi juga mengamankan, menetralkan,

¹¹ Kamus Umum Bahasa Indonesia hal 1251

¹² Ramlan Suebakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal 145

¹³ *Hand Out Mata Kuliah Komunikasi dan Konflik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

melukai atau mengurangi kualitas – kualitas saingan – saingan mereka. Apabila konflik didefinisikan sebagai pola distribusi kekuasaan, maka pola ini dipengaruhi oleh factor ekonomi, social, dan kultural. Siapapun yang menduduki posisi social tinggi maka dia berkesempatan untuk berkuasa dan lebih mudah menjadi pemimpin politik.

Apabila dikaji lebih jauh lagi mengenai konflik dalam aspek politik diartikan sebagai pertentangan yang terbuka antar kekuatan –kekuatan politik yang memperebutkan kekuasaan. Pengertian konflik disini merujuk pada hubungan antar kekuatan politik (kelompok dan Individu) yang memiliki, atau yang merasa memiliki sasaran – sasaran yang tidak sejalan.¹⁴ Beberapa definisi tentang konflik yang dikemukakan oleh para tokoh, antara lain:

1. Teori konflik menurut Dahrendorf,

Mendefinisikan bahwa konflik merupakan keteraturan yang terdapat dalam masyarakat, berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya, oleh mereka yang berada diatas.¹⁵

2. Teori konflik menurut Dubrin, A. J

Mendefinisikan bahwa konflik mengacu pada pertentangan antar individu atau antar kelompok yang dapat meningkatkan ketegangan sebagai akibat saling menghalang dalam pencapaian tujuan.¹⁶

¹⁴ Moch Nurhasim (Ed.), 2005, *Konflik Antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Pustaka Pelajar, Jakarta. Hal. 14

¹⁵ George Ritzer dan Douglas J. Gaubman, 2004, *The* ...

3. Teori konflik menurut Harjana

Mendefinisikan bahwa konflik adalah perselisihan, pertentangan antara orang atau dua kelompok dimana perbuatan yang satu berlawanan dengan yang lainnya sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu.

Menurut teori Biological and Psychological theories. Konflik yang terjadi biasanya disebabkan oleh faktor dari dalam maupun faktor dari luar (Internal dan Eksternal) individu tersebut. Ketika kebutuhan pribadi ditransformasikan dalam interaksi politik maka perilaku individu juga akan menjadi bersifat politik.

b. Jenis Konflik

Dalam proses untuk membedakan jenis konflik yang terjadi pada masyarakat secara umum perlu pembahasan secara teoritis mengenai jenis – jenis konflik. Jenis – jenis konflik menurut Soekanto, S, antara lain adalah:

1. Konflik antar pribadi, didasari bahwa dalam setiap individu mempunyai perbedaan dan keunikan, yang berarti tidak ada dua orang individu yang sama persis dalam aspek – aspek jasmani dan rohaniah.

2. Konflik Rasial, sumber konflik bukan hanya perbedaan kepentingan, tujuan maupun kegagalan dalam komunikasi akan tetapi perbedaan kebudayaan dan ciri- ciri badaniah dapat menjadi latar belakang timbulnya konflik. Konflik rasial merupakan salah satu jenis konflik yang lebih luas dibandingkan dengan konflik kelompok. Ras yang berjumlah mayoritas di suatu masyarakat cenderung ingin menguasai dan merasa mempunyai persamaan hak yang lebih luas.
3. Konflik antar kelas – kelas sosial, masyarakat yang terdiri dari beberapa lapisan sosial yang hidup saling membutuhkan, jenjang pendidikan dan tingkat kekayaan anggota masyarakat yang sangat bervariasi
4. Konflik politik antar golongan- golongan dalam masyarakat, dalam hal ini konflik lahir dari adanya perbedaan kepentingan politik dalam masyarakat, yang mana di dalam masyarakat terdapat nilai berharga yang ingin direbutkan yaitu kekuasaan.
5. Konflik bersekala internasional antar Negara, konflik ini terjadi biasanya dikarenakan oleh perbedaan kepentingan antara Negara satu dengan Negara lainnya dalam proses siapa menguasai siapa.¹⁷

Selain itu proses untuk membedakan jenis konflik yang terjadi dalam satu organisasi seperti yang diungkapkan Coser melalui Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer (2010) antara lain :

¹⁷Ibid

1. Konflik Eksternal (*external conflict*) mampu menciptakan dan memperkuat identitas kelompok. Konflik dapat membuat batasan – batasan diantara dua kelompok dalam system sosial dengan memperkuat kesadaran dan kesadaran kembali atas keterpisahan, sehingga menciptakan kesadaran kelompok dalam system. Selain itu konflik eksternal akan menjadi proses refleksi kelompok – kelompok identitas mengenai kelompok diluar mereka sehingga meningkatkan partisipasi setiap anggota terhadap pengorganisasian kelompok. Kelompok identitas di luar mereka ini merupakan “*negative reference group*”.
2. Konflik Internal (*internal conflict*) mampu memberi fungsi positif terhadap kelompok identitas mengenai adanya kesalahan perilaku. Ada perilaku anggota yang dianggap menyimpang dari teks norma kelompok tersebut. Selain itu, konflik internal merupakan mekanisme bertahan dari eksistensi dalam suatu kelompok atau organisasi.¹⁸

c. Pengelolaan Konflik

Dalam penelitian terdapat beberapa pendekatan untuk menangani konflik, yang terkadang juga dipandang sebagai tahap-tahap dalam suatu dalam penyelesaian konflik yang terjadi pada saat pemilukada, sehingga konflik yang terjadi pada saat pemilukada dapat teratasi dengan baik, dan diharapkan nantinya

¹⁸ Cesar, *Demokrasi Sosial dan K...*

tidak ada konflik lagi yang timbul dalam pemelukada selanjutnya. Seperti yang diutarakan oleh Fisher, dkk menggambarkan sebagai berikut :

1. **Pencegahan konflik** yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras.
2. **Penyelesaian konflik** bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian.
3. **Pengelolaan konflik** bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat.
4. **Resolusi konflik** yaitu kegiatan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan.
5. **Transformasi konflik** yaitu kegiatan mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.¹⁹

Versi yang lain tentang pengelolaan konflik yang ditawarkan oleh Johan Galtung sebagaimana dikutip Nurhasyim yang menawarkan tiga model yang

¹⁹ Fisher, Simon, dkk., 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Dunia Jal. The*

berkaitan satu sama lain yaitu, *Peace Keeping, Peace Building, Dan Peace Making*.²⁰ Ketiga kerangka model itu dapat dilihat dengan tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Kerangka Pengelolaan Konflik Versi Johan Galtung

Masalah	Strategi	Target
Kekerasan	Peace Keeping (aktivitas militer)	Kelompok pejuang atau militer
Pertentangan Kepentingan	Peace Making (aktivitas politik)	Pemimpin atau tokoh
Struktur sosial dan sikap negatif	Peace building (aktivitas sosial ekonomi)	Masyarakat umum

Sumber : Nurhasym. 2005

Model yang *pertama* yaitu *peace keeping* (operasi keamanan) yang melibatkan aparat keamanan dan keamanan perlu diterapkan guna meredam konflik dan menghindarkan penularan konflik terhadap kelompok lain. *Kedua*, *Peace Making* adalah upaya negosiasi antara kelompok- kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan. Ada beberapa metode yang bias dipilih dalam tahapan negosiasi ini. Pertama, melalui kekerasan, kedua melalui hukum atau pendekatan konvensional. Pendekatan hukum akan efektif dilakukan pemerintah yang memiliki legitimasi. Tanpa legitimasi, Negara akan kehilangan kewenangan dan kewibawaan dalam mengelola Negara termasuk rekonsiliasi sebagai bagian resolusi konflik. Dan yang *ketiga* yaitu *peace building* yaitu strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antara pihak yang

²⁰ Nurhasym, och (Ed) 2005. Konflik Anta Belit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah

terlibat konflik. Model ini lebih menekankan pada kualitas interaksi dari pada kuantitas. Karena itu lima hal yang harus diperhatikan dalam tahap ini yaitu pertama, interaksi yang terjadi harus antara pihak- pihak yang memiliki kesejajaran status. Kedua, adanya dukungan dari lingkungan sosial, ketiga, komunikasi terjadi secara intim. Keempat, proses komunikasi harus menyenangkan kedua belah pihak. Kelima, ada tujuan yang hendak dicapai bersama.

d. Pengaruh Konflik Dalam Organisasi

Konflik tidak selalu berakibat negatif pada individu atau kelompok yang bersangkutan konflik memiliki banyak fungsi positif. Yang terpenting adalah bagaimana mengelola konflik yang timbul supaya tidak menimbulkan kerugian tapi justru membawa dampak konstruktif bagi individu atau kelompok yang terlibat. Konflik kelompok mendorong individu yang berada didalamnya untuk terlibat dan belajar mengenai proses pengambilan

Menurut Wall dan Callister pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh adanya konflik terhadap individu atau kelompok dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal, yaitu :²¹

a. Pengaruh terhadap individu

²¹ Borman, W. C., White, L. A., & Dorsey, D. W. (1995). Effects Of Rate Task Performance And

Pada level yang rendah dari intensitas perselisihan yang ada, konflik dapat mendorong seseorang untuk merasa lebih segar dan membangkitkan semangat. Namun pada level yang tinggi, individu yang sedang berkonflik dapat mengalami emosi, seperti marah, permusuhan, merasa tertekan, cemas, dan stress. Emosi yang bersifat negatif di atas dapat menimbulkan adanya frustrasi diri, menurunkan motivasi dan semangat kerja, serta kepuasan kerja yang rendah.

b. Pengaruh terhadap hubungan interpersonal

Bila seseorang dipandang merintangi tercapainya tujuan, maka ekspresi kemarahan, permusuhan dan emosi negatif lainnya dapat terpacu sebagai suatu persepsi yang bersifat negatif terhadap lawan konflik. Terkadang sikap ini cenderung tidak rasional bila disikapi secara emosional. Persepsi di atas akan membuat seseorang kurang percaya terhadap lawan konfliknya dan membuat seseorang tidak dapat melihat cara pandang orang lain terhadap dirinya. Selama dan setelah konflik, biasanya sikap terhadap konflik umumnya menjadi negatif

c. Pengaruh terhadap komunikasi.

Konflik sering kali memotivasi perselisihan ke isu-isu yang mengambang, untuk bersikap diam ataupun menghindari lawan konflik. Bila komunikasi tidak berjalan dengan baik maka kesalahpahaman, salah pengertian ataupun permusuhan akan mudah terjadi. Demikian permusuhan ini

sering kali ditunjukkan dengan suatu ancaman, serangan fisik, menyalahkan orang lain, tindakan kekerasan, dan adanya suatu sikap untuk protes.

2. Konsep Dasar Kinerja Organisasi

a. Definisi Kinerja Organisasi

Ada beberapa pendapat yang mendefinisikan tentang kinerja organisasi, dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Menurut Peter Jennergen (dalam Steers,2003) pengertian kinerja organisasi adalah tingkat yang menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan tugas dapat dijalankan secara aktual dan misi organisasi tercapai.²²
2. Pamungkas (2000) menjelaskan bahwa kinerja adalah penampilan cara-cara untuk menghasilkan sesuatu hasil yang diperoleh dengan aktivitas yang dicapai dengan suatu unjuk kerja
3. Menurut WJS. Puerwadarminto Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya²³
4. Menurut Suyadi Prawirosentada Performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing – masing dalam

²² Steers, R. M. 2003. *Organization Effectiveness, A Behavioral View*, Good Year Publishing Company, diterjemahkan oleh Magdalena Jamin. 1980. Jakarta :Erlangga

²³

rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika²⁴

Dari konsep di atas dapat dipahami bahwa kinerja adalah seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Dalam konteks penelitian ini, maka pengertian kinerja merupakan tingkat kemampuan organisasi atau DPC PDIP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi dan misinya.

Lenvine (1996) mengemukakan tiga konsep yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik, yakni :²⁵

- a. Responsivitas (*responsiveness*) : menggambarkan kemampuan organisasi dalam menjalankan misi dan tujuannya terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penilaian responsivitas bersumber pada data organisasi dan masyarakat, data organisasi dipakai untuk mengidentifikasi jenis-jenis *kegiatan dan program organisasi*, sedangkan data masyarakat pengguna jasa diperlukan untuk mengidentifikasi *demand* dan kebutuhan masyarakat.
- b. Responsibilitas (*responsibility*): pelaksanaan kegiatan organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang implisit atau eksplisit.

²⁴Surya Darma, 2005, *Manajemen Kinerja Falsafah Teori dan Penerapannya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

²⁵ Charles Lenvine. *Public Administration : Challenges, Choice, Consequences*. Glenview Illinois : Scott Foreman/Little Brown Higher Education. 1990

Responsibilitas dapat dinilai dari analisis terhadap dokumen dan laporan kegiatan organisasi. Penilaian dilakukan dengan mencocokkan pelaksanaan kegiatan dan program organisasi dengan prosedur administrasi dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam organisasi.

- c. Akuntabilitas (*accountability*): menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Data akuntabilitas dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti penilaian dari wakil rakyat, para pejabat politis, dan oleh masyarakat
- d. Produktivitas, dimaksudkan tidak hanya untuk mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan sehingga diharapkan memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting dengan kualitas layanan yang terbaik, maka akan tercipta kepuasan masyarakat yang diberikan pelayanan
- e. Kualitas Pelayanan, menilai seberapa jauh pelayanan dapat melaksanakan tugasnya.

3. Konsep Partai Politik

a. Definisi Partai Politik

Definisi Definisi Partai Politik

- a. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisis anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai- nilai yang sama, kelompok ini berusaha memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitual untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.²⁶
- b. Menurut Mark M. Hagopian
Partai politik adalah salah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaanya untuk memilih, yang bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.²⁷
- c. Menurut Carl J. Friedrich
Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya dimanfaatkan yang bersifat adil maupun materiil.²⁸
- d. Menurut Sigmud Neuman, dalam karangannya *Modern Political Parties* mengemukakan definisi partai politik sebagai “ organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan, dengan suatu

²⁶ Ichlasul Amal, *Teori Mutakhir partai politik*, PT. Tirta wacana, Yogyakarta, 1988

²⁷ Ramlan Surbakti, *Op.cit*, hal. 166

²⁸ Miriam Budiardjo, *Op.cit*, hal. 404

golongan atau golongan – golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Dalam hal ini partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan – kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga – lembaga pemerintahan resmi.²⁹

e. Raymodn Garfield Gathel atau RH Soitau

Partai politik adalah “sekelompok warga Negara yang sedikit terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan memanfaatkan kekuasaanya untuk memilih yang bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka”.³⁰

Sistem demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa adanya partai politik. Pembuatan keputusan secara teratur hanya mungkin dilakukan jika ada pengorganisasian berdasarkan tujuan-tujuan kenegaraan. Tugas partai politik adalah untuk menata aspirasi rakyat untuk dijadikan opini publik yang lebih sistematis sehingga dapat menjadi dasar pembuatan keputusan yang teratur.³¹ Dengan demikian partai politik dapat dijadikan sebagai “jembatan “ antara masyarakat dan system politik yang memberikan kesempatan kepada warga Negara yang berpartisipasi secara aktif dalam dunia politik. Semua kelompok atau warga Negara disini dilibatkan dalam sistem politik melalui partai politik,

²⁹ Ibid

³⁰ Ulung Pribadi, *Diklat Kuliah Pengantar Ilmu Politik* (Fisipol UMY, 1996) hal 43

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitiaan MK RI, 2000), hal. 115-166

sehingga partai politik dapat memberikan kestabilan dalam demokrasi di Indonesia dan menjadi sebuah struktur dalam sistem politik.

b. Peran Partai Politik

Peran partai politik adalah memberikan proses pendidikan bangsa khususnya untuk generasi bangsa dan memberikan suatu proses pembangunan politik maupun ekonomi.

3. Fungsi Partai Politik

Dalam sistem demokrasi partai politik mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut yaitu:

1. Partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik

Menurut seorang ahli sosiologi politik M.Rush (1992)³² :

Sosialisasi politik adalah proses yang melalui orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik.

Sosialisasi politik menurut Dennis Kavanagh dalam *Political Culture* menjelaskan bahwa sebuah proses untuk memasyarakatkan nilai- nilai politik ke dalam suatu masyarakat.³³

Dari kedua pendapat para ahli diatas dapat kita ketahui inti dari sosialisasi politik adalah sebuah proses pengenalan politik kepada masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai nilai- nilai politik, masalah

politik, supaya masyarakat dapat memahami politik dan akhirnya mereka dapat berpartisipasi ketika pemilu. Dalam proses ini secara tidak langsung partai politik sudah melakukan fungsinya sebagai pendidikan politik karena partai politik melakukan sebuah proses transformasi pengetahuan kepada masyarakat. Di Negara- Negara berkembang kegiatan partai politik sebagai sarana sosialisasi politik bagi masyarakat, hanya sebatas pemberian pemahaman mengenai ideologi partai saja, dan partai melakukan sosialisasi pada masyarakat saat mendekati pesta demokrasi. Padahal sosialisasi pada masyarakat itu adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh partai politik secara berkelanjutan, supaya memberikan kesadaran politik pada masyarakat yang berdampak pada keikutsertaan masyarakat dalam ranah politik baik sebagai pengamat, ataupun sebagai kanca perpolitikan.

2. Partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik

Rekrutmen politik menurut Czudnowskin adalah suatu proses berhubungan dengan individu – individu atau kelompok yang dilantik dalam peran – peran politik aktif.³⁴

Selain itu Czudnowskin juga mengemukakan faktor yang mempengaruhi terpilihnya atau tidak seseorang dalam lembaga legeslatif antara lain yaitu :

- a. *Social Background*, artinya faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial calon elit dibesarkan.

³⁴ Khoirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Menakar kinerja Partai Politik Era Transisi Indonesia, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2004, hal 101

- b. *Political Socialization*, dimana melalui sosialisasi politik seseorang menjadi terbiasa dengan tugas – tugas ataupun isu – isu yang harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik.
- c. *Initial Political Activity*, dimana faktor ini menunjuk pada aktivitas atau pengalaman politik seorang calon elit selama ini.
- d. *Apprenticeship*, dimana faktor ini menunjuk langsung kepada proses “magang” dari calon elit ke elit yang lain yang sedang menduduki jabatan yang telah diincar oleh calon elit.
- e. *Occupational Variables*, apabila calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang belum tentu berhubungan dengan politik. Ini menjadi menarik sebab elit politik sebenarnya tidak sekedar dinilai dari popularitas saja, namun dinilai faktor kapasitas intelektual, vitalitas kerjanya, latihan peningkatan kemampuan yang diterima, dan pengalaman kerja.
- f. *Motivation*, dimana hal ini merupakan faktor yang paling penting, yakni melihat motivasi yang dimiliki oleh calon elit tersebut menduduki suatu jabatan tertentu.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa rekrutmen politik merupakan sebuah proses dimana masyarakat mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan. Dimana partai politik tersebut mencari dan memilih orang-kelompok yang akan menduduki jabatan tersebut.

sebagai anggota partai (political Recruitment). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Selain itu partai politik juga membidik golongan muda untuk mendidik menjadi kader di masa mendatang yang nantinya akan menggantikan pemimpin yang lama.

3. Partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik

Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau kelompok akan hilang dan tidak pernah tersalurkan oleh pemerintah, apabila tidak digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses menghubungkan pendapat orang lain ini disebut dengan "penggabungan kepentingan" (interest aggregation). Setelah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dengan bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan "pengumpulan kepentingan" (interest articulation). Dengan adanya partai politik ini dapat dijadikan wadah untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana- rencana dan kebijakan- kebijakan pemerintah. Dengan demikian arus informasi serta dialog dari atas kebawah dan dari bawah ke atas, yang dimana partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat.

4. Partai politik berfungsi sebagai sarana pengatur konflik .³⁵

Dalam sebuah Negara tidak bias dihindari bahwa perbedaan pendapat juga pandangan seringkali menimbulkan konflik, oleh karena itu disini partai politik sebagai salah satu sarana pengatur konflik harus biasa menjadi mediator atau penengah dalam hal menyelesaikan permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat maupun dilingkungan pemerintah.

5. Partai politik berfungsi sebagai sarana agregasi dan artikulasi kepentingan

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil – wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan, kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik.

Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan- tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok- kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif- alternatif pembuatan kebijakan.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa agregasi dan artikulasi kepentingan adalah cara menyalurkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat dan mengeluarkannya berupa keputusan politik. Dengan adanya fungsi ini partai politik disini sebagai media artikulasi dan agregasi kepentingan

yang berarti ikut membina kelangsungan kehidupan di Negara yang menganut paham demokrasi. Sebab ini merupakan masukan masyarakat bagi sistem politik dan partai politik itu sendiri.

6. Partai politik sebagai sarana partisipasi politik

Menurut Sudijono Sastroatmodjo, partisipasi politik adalah kegiatan yang dilaksanakan warga Negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.³⁶

Sedangkan menurut Huntington dan Nelson partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah, serta partisipasi ini bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap, atau sporadic, serta damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.³⁷

Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan individu dalam kegiatan yang ada dalam sistem politik. Selain itu partisipasi politik dapat kita definisikan sebagai kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi

Partisipasi politik itu sendiri dibagi menjadi dua jenis antara lain :³⁸

- a. *Autonomous Partisipation*, adalah partisipasi dari masyarakat yang muncul dari dalam diri mereka sendiri berdasarkan kesadaran individu kerana pendidikan tinggi, ekonomi yang cukup dan ketergantungan yang rendah.
- b. *Mobilized Partisipation*, adalah partisipasi yang dipengaruhi oleh pihak- pihak lain dan bukan karena kesadaran mereka sendiri, biasanya fenomena ini disebabkan oleh ketergantungan terhadap pemerintah yang tinggi, tetapi mendapat tekanan dan pendidikan yang rendah. Dalam hal ini partai politik adalah wadah warga Negara untuk berpartisipasi politik.

E. Definisi Konsepsional

Definisi konseptual adalah suatu metode untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya, sedangkan konsep merupakan abstraksi mengenai satu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dan sejumlah karakteristik kejadian, hal ini digunakan agar dalam penulisan tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun definisi konseptual yang digunakan adalah:

³⁸ Djuw A. Partantun, M. Dahlan, Al-Dam, K... Jindil, P... A... S... 1994, hal. 170

1. Konflik Internal

Konflik Internal (*internal conflict*) mampu memberi fungsi positif terhadap kelompok identitas mengenai adanya kesalahan perilaku. Ada perilaku anggota yang dianggap menyimpang dari teks norma kelompok tersebut. Selain itu, konflik internal merupakan mekanisme bertahan dari eksistensi dalam suatu kelompok atau organisasi. Fungsi positif konflik internal terhadap kelompok bisa berlaku apabila konflik tidak menyertakan nilai nilai dan prinsip dasar.³⁹

2. Pengaruh Konflik Terhadap Organisasi

Konflik tidak selalu berakibat negatif pada individu atau kelompok yang bersangkutan konflik memiliki banyak fungsi positif. Yang terpenting adalah bagaimana mengelola konflik yang timbul supaya tidak menimbulkan kerugian tapi justru membawa dampak konstruktif bagi individu atau kelompok yang terlibat. Konflik kelompok mendorong individu yang berada didalamnya untuk terlibat dan belajar mengenai proses pengambilan

3. Kinerja Partai Politik

Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi dengan wewenang dan tanggung jawab

masing- masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai etika.⁴⁰

Dalam kinerja partai politik disini yaitu mengenai seberapa jauh pelaksanaan fungsi partai politik merupakan sebuah wujud nyata atau realisasi dari fungsi partai politik yang sudah ada seperti sosialisasi politik, pengatur konflik, komunikasi politik, pengendali politik dan rekrutmen politik.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variable⁴¹. Dengan kata lain definisi operasional ini akan memberikan gambaran mengenai variable apasaja yang dapat digunakan untuk membatu sebuah penelitian.

1. Indikator-indikator dalam penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna untuk mengukur tingkat capaian kinerja, dengan menggunakan indikator- indikator sebagai berikut:

a. Aspek Responsivitas (*responsiveness*)

a) Daya tanggap pengelola organisasi terhadap kritik

b) Kemampuan organisasi dalam menangani keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat

b. Aspek Responsibilitas (*responsibility*)

⁴⁰ Suryadi Prawirosentana, *Kebijakan Kinerja Karawan*, BPFE, Yogyakarta, 12999, hal.1

⁴¹ Masi Siagian, *Manajemen Organisasi*, BPFE, Yogyakarta, 12999, hal.1

- a) Kegiatan serta program yang dilakukan sesuai dengan visi misi
 - b) Pencapaian sasaran dan tujuan organisasi
 - c. Aspek Akuntabilitas (*accountability*)
 - a) Keterbukaan
 - b) Tanggung jawab pengelola organisasi dalam hal ini terkait dengan laporan atau kegiatan dalam organisasi
 - d. Aspek Produktivitas (*productivity*)
 - a) Terealisasinya kegiatan
 - b) Usaha untuk pencapaian hasil
 - e. Aspek Kualitas Profesionalisme
 - a) Terkait dengan SDM anggota
 - b) Tingkat kedisiplinan pelaksanaan tugas
2. Indikator- indikator dari pelaksanaan fungsi- fungsi partai politik antara lain sebagai berikut
- 1) Partai politik sebagai sarana Komunikasi Politik
 - a. Media penghubung antara masyarakat dengan pemerintah
 - b. Sarana untuk menyebarkan rencana- rencana dan kebijakan- kebijakan pemerintah.
 - 2) Partai politik sebagai sarana Pengatur Konflik
 - a. PLH dari DPD Jawa Tengah berperan sebagai penengah

3) Partai politik sebagai sarana Rekrutmen Politik

- a. Partai politik yang mempertimbangkan SDM dalam membidik golongan muda untuk mendidik menjadi kader di masa mendatang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif, sifat penelitian deskriptif ini pada umumnya menuturkan dan menafsirkan data yang ada.

Menurut Winarno Surachmad. Penelitian Deskriptif merupakan istilah yang umum yang mencakup beberapa teknik deskriptif diantara peneliti yang menuturkan, mengklasifikasikan, menggambarkan dan menganalisis data untuk menyelesaikan masalah –masalah yang ada pada saat ini dengan menggunakan teknik interview, kuesioner, dokumentasi.⁴²

Sedangkan deskriptif kualitatif adalah menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian sebagai suatu karakter, ciri, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, atau fenomena tertentu⁴³

⁴² Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Reseach*, Tersito Bandung, 1987, hal 139

⁴³ Moeri Sinambing, *Statistik*, Tersito Bandung, 1987, hal 139

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Dengan alasan ingin mengetahui apakah konflik internal berpengaruh terhadap kemenangan pemilukada Kabupaten Pati 2011

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari responden yang berupa keterangan dari pihak- pihak terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian. Dalam hal ini data- data yang dikumpulkan dalam penelitian yaitu data tentang pelaksanaan fungsi partai politik yang diperoleh langsung dari responden berupa jawaban terhadap beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Disini penulis melakukan survey langsung kelapangan, dan dalam pencarian data ini sangat ditekankan pada penggunaan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung untuk melengkapi data primer seperti buku- buku, majalah, jurnal, dan pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Adapun data sekunder yang penulis menggunakan adalah data...

dokumen, artikel, foto- foto sebagai bukti kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPC Kabupaten Pati serta buku acuan yang berkaitan dengan fungsi partai politik.

4. Unit Analisis Data

Sehubungan penelitian ini mengkaji tentang kinerja partai politik dalam pelaksanaan fungsi partai politik maka unit analisis dalam penelitian ini adalah DPC PDIP Kabupaten Pati.

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka dapat dilaksanakan dengan teknik- teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Berkaitan dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tidak menggunakan pedoman (guide) wawancara.⁴⁴

Dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada Pelaksana Harian (PLH) yang diutus oleh DPP PDIP yaitu Bp Drs. Giri Dahono sebagai

⁴⁴ Rurhan Runcin, *Penelitian Kualitatif/ Komunitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal. 100

sekretaris PLH DPC PDIP dan kepada Bp Budiono, SH, MH yaitu anggota komisi 1 bidang hukum dan pemerintahan dari fraksi PDIP.

a. Dokumentasi

Dokumentasi ini sendiri merupakan data-data yang mendukung penelitian yang dapat diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu memakai dokumen – dokumen sebagai sumber data yang diperoleh.

Teknik dokumentasi ini dapat penulis lakukan dengan cara melihat foto- foto, buku- buku, jurnal, catatan- catatan, laporan- laporan, yang dapat diperoleh secara langsung dari kantor DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati.

6. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, dimana dalam penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang menjadi responden dari penelitian ini. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha memahami situasi dan mencoba mendalami gejala dengan menyimpulkan masalahnya. Sehingga analisis data

menyimpulkan masalahnya.